

ANALISIS KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI PROVINSI JAWA TENGAH 2011-2013

(Multidimensional Poverty Analysis in Jawa Tengah Province, 2011-2013)

Lestari Indriani^{1*}, Setiyono²

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

² Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta

E-mail: *lestari.indriani@bps.go.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih tepat untuk mengukur fenomena kemiskinan yang kompleks dan bersifat multidimensional tersebut. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011—2013 dan metode Alkire-Foster, penelitian ini mencoba mengukur kemiskinan ditinjau dari berbagai deprivation yang dialami oleh penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan 3 dimensi, yaitu: nutrisi dan kesehatan, pendidikan, serta standar hidup, dengan 10 indikator, yaitu: konsumsi kalori rumah tangga, konsumsi protein rumah tangga, lama sekolah, partisipasi sekolah, bahan bakar memasak, sanitasi, air bersih, akses listrik, jenis lantai terluas, dan aset yang dimiliki. Hasil menunjukkan bahwa kemiskinan yang diukur dengan hanya mempertimbangkan dimensi moneter ternyata memberikan gambaran yang berbeda dengan kemiskinan yang diukur dengan mempertimbangkan berbagai dimensi (multidimensi). Meskipun keduanya sama-sama memperlihatkan fenomena perdesaan, yang ditunjukkan dari lebih tingginya besaran indikator kemiskinan di perdesaan daripada perkotaan. Persentase penduduk miskin multidimensi yang lebih besar dibanding persentase penduduk miskin moneter mengindikasikan bahwa terdapat penduduk yang tidak teridentifikasi miskin secara moneter namun masih mengalami deprivation pada berbagai dimensi kemiskinan yang lain. Kontributor terbesar terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Jawa Tengah pada 2011—2013 adalah dimensi nutrisi dan kesehatan, yang diikuti dengan dimensi standar hidup, dan pendidikan.

Kata kunci: Kemiskinan Multidimensi, Metode Alkire-Foster, Deprivasi

Abstract

Poverty is a complex issue; so that a more precise approach is needed to measure the complex and multidimensional poverty phenomenon. Using the data from the National Socio-economic Survey (Susenas) 2011—2013 and Alkire-Foster methods, the study sought to measure poverty in terms of a variety of deprivation experienced by people in Jawa Tengah Province. This study consisted of 3 dimensions, namely: nutrition and health, education, and standard of living, with 10 indicators: household calorie consumption, household protein consumption, years of schooling, child enrollment, cooking fuel, sanitation, clean water, electric accessibility, largest type of flooring, and owned assets. Results showed a fact that poverty, measured by only considering the monetary dimension gave a different picture from the poverty measured by considering various dimensions (multidimensional), although both presented the phenomena of rural areas, which is shown by the higher magnitude of indicators of poverty in rural areas than cities. The percentage of multidimensional poverty was greater than the percentage of monetary poverty, which indicated that there were people who were not identified as in monetary poverty, but they were still suffering from deprivation of other various dimensions of poverty. The biggest contributors to the level of multidimensional poverty in Jawa Tengah Province, during 2011—2013, were the dimensions of nutrition and health, especially coming from household protein consumption indicator, followed by the dimensions of the standard of living and education.

Keywords: Multidimensional Poverty, Alkire-Foster Methods, Deprivation

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai oleh tersedianya kesempatan kerja produktif bagi penduduk yang tumbuh begitu cepat, nampaknya kurang berhasil mengurangi laju kemiskinan di suatu negara sedang berkembang (Arsyad, 2010: 280). Fakta ini juga terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, anggota G-20 dengan ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan paritas daya beli. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menguat selama periode tahun 1999-2013 (Bank Dunia, 2015), ternyata hanya diikuti tingkat penurunan kemiskinan yang cenderung melambat dari tahun ke tahun. Nampaknya, isu kemiskinan ini masih memerlukan perhatian serius pemerintah Indonesia.

Isu kemiskinan yang masih perlu perhatian di antaranya adalah isu pengukurannya. Selama ini, pengukuran kemiskinan, termasuk di Indonesia, seringkali dikaitkan dengan kekurangan pendapatan atau pengeluaran, sehingga kemiskinan dianggap sebagai fenomena dimensi tunggal (unidimensional) yang lebih bersifat moneter (kemiskinan moneter). Pengukuran kemiskinan yang menekankan dimensi moneter memang mudah namun hasilnya tidak memuaskan. Ketidakpuasan terhadap pengukuran kemiskinan moneter mulai muncul ketika bukti empiris menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional, ternyata tidak mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di negara-negara sedang berkembang secara langsung, sehingga perlu alternatif pengukuran untuk melengkapi pengukuran konvensional (pendekatan moneter). Pernyataan ini disampaikan dalam World Employment Conference pada 1976 (Muro et al., 2011).

Sejalan hal tersebut, beberapa peneliti seperti Sen (1979; 1981) serta Alkire dan Santos (2014) telah merangkum beberapa kelemahan pengukuran kemiskinan

moneter, salah satu di antaranya adalah adanya pola perilaku konsumsi masing-masing individu yang tidak selalu sama, sehingga pencapaian pada suatu garis kemiskinan (pendapatan atau pengeluaran) tertentu tidak menjamin kebutuhan dasar seseorang sudah terpenuhi. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan yang melibatkan multidimensi diperlukan untuk mengatasi ketidakpuasan penggunaan pengukuran kemiskinan moneter.

Berbagai studi literatur tentang kemiskinan sebagai fenomena yang bersifat multidimensi, tidak hanya terbatas pada diskusi akademis murni namun justru semakin meluas menjadi perdebatan kebijakan, baik domestik maupun internasional (Ferreira dan Lugo, 2013). Bahkan, di negara seperti Meksiko pada 2009 dan Columbia di tahun 2011 telah mengumumkan tentang penggunaan indeks kemiskinan multidimensi sebagai ukuran resmi kedua negara tersebut.

Namun demikian, meskipun studi mengenai kemiskinan multidimensi sudah berkembang dan mulai digunakan sebagai angka resmi kemiskinan di beberapa negara, studi tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia masih terbatas. Beberapa peneliti yang tercatat pernah melakukannya adalah Wardhana (2010), Alkire-Foster (2011), Ballon dan Apablaza (2012), serta Hanandita dan Tampubolon (2015). Meskipun telah tersedia sejumlah hasil penelitian serupa sebelumnya, namun penelitian-penelitian itu cenderung dilakukan pada lingkup nasional atau provinsi dengan dimensi yang berbeda-beda. Padahal, untuk menganalisis kinerja pemerintah tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat nasional atau provinsi saja, melainkan perlu cakupan penelitian yang lebih spesifik, yaitu tingkat kabupaten/kota (Isard dan Burton, 1983)

Terkait hal tersebut, studi kemiskinan multidimensi dalam penelitian ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Studi kemiskinan multidimensi di Jawa Tengah penting, sebab salah satu permasalahan

strategis yang terjadi di Jawa Tengah adalah tingginya persentase jumlah penduduk miskin (secara moneter) yang melebihi persentase rata-rata nasional. Laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada 2007, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah adalah yang tertinggi di Pulau Jawa, dengan besaran 17,23 persen, hampir 5 poin lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 12,52 persen. Kondisi yang sama terus berlangsung hingga semester I 2018. Ketika pada 2018, persentase penduduk miskin di tingkat nasional telah mencapai 1 digit (9,82 persen), persentase kemiskinan di Jawa Tengah masih bertahan di dua digit, yaitu 11,32 persen. Berdasarkan data tersebut dan munculnya ketidakpuasan terhadap pengukuran kemiskinan moneter, semakin menguatkan alasan tentang pentingnya studi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dengan memandang kemiskinan bukan hanya sebagai fenomena yang bersifat unidimensional namun sebagai bentuk deprivasi dari berbagai dimensi serta beberapa permasalahan strategis yang terjadi, maka menarik untuk meneliti dan menganalisis variabel kemiskinan yang diukur dengan pendekatan multidimensi di Provinsi Jawa Tengah.

Bertitik tolak dari uraian dan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur, menganalisis, dan memetakan kondisi kemiskinan multidimensi di Jawa Tengah, selama kurun waktu 2011—2013. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi kemiskinan multidimensi di Jawa Tengah beserta sebarannya secara spasial, selama kurun waktu 2011—2013.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian kemiskinan multidimensi ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Data

Pengukuran kemiskinan multidimensi pada penelitian ini membutuhkan data mentah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) Kor dan Modul Konsumsi 2011—2013, dengan jumlah sampel tahun 2011 sebanyak 26.769 rumah tangga, tahun 2012 sebanyak 26.922, dan 2013 sebesar 26.651 rumah tangga, sehingga total sampel diolah adalah 80.338 rumah tangga.

Teori

Konsep Dasar dan Definisi Kemiskinan

Secara tradisional, kemiskinan seringkali dipandang sebagai kekurangan pendapatan atau konsumsi (Yu, 2013). Kemiskinan juga dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman dan komunikasi serta hilangnya kehormatan, rasa kepercayaan dan harga diri (Anand dan Sen, 1997). Sejalan dengan Anand dan Sen (1997), menurut Bourguignon dan Chakravarty (2003) kemiskinan merupakan suatu manifestasi dari rendahnya kesejahteraan, yang tergantung pada 2 variabel, yaitu moneter dan bukan moneter. Sementara itu, menurut Bank Dunia (2001), kemiskinan bukan hanya suatu bentuk dari kekurangan materiil (yang selama ini diukur dengan pendekatan pendapatan maupun pengeluaran) namun juga mencakup pencapaian yang rendah dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Pengukuran Kemiskinan Moneter

Terdapat beberapa cara untuk mengukur kemiskinan moneter. Menurut Bank Dunia (2015), seseorang dikatakan miskin absolut jika penghasilan per kapita per hari kurang dari US\$1,9 berdasarkan paritas daya beli. Angka ini merupakan revisi dari garis kemiskinan sebelumnya, yang hanya sebesar US\$1,25 per kapita per hari. Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berpusat pada paradigma yang dimotori oleh Bank Dunia tersebut, termasuk angka resmi kemiskinan yang digunakan di Indonesia.

Angka resmi kemiskinan yang dipakai oleh Indonesia hingga saat ini adalah pengukuran kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) tersebut terdiri dari 2 komponen, yaitu: Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan

Nonmakanan GKNM). Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar dari GKM diwakili oleh 52 jenis komoditas. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar dari GKNM diwakili oleh 51 jenis komoditas perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan (BPS, 2015).

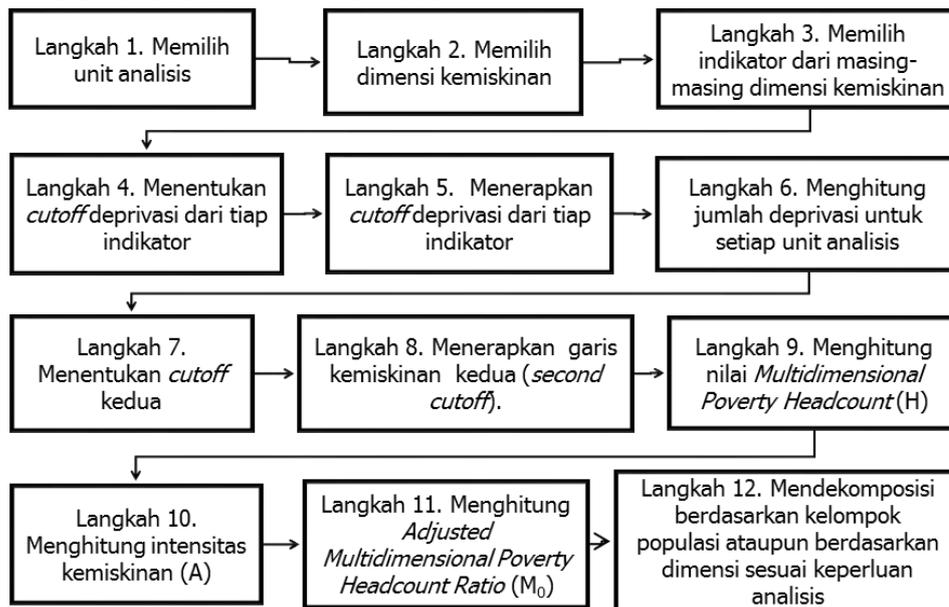
Kemiskinan Multidimensi

Konsep tentang kemiskinan sebagai fenomena multidimensi sebenarnya sudah diungkapkan oleh Sen (1979) begitu pula Arsyad (2010: 4), yang intinya menyebutkan bahwa kemiskinan itu harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi, dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi. Tercatat ada

beberapa metode yang digunakan untuk mengukur kemiskinan multidimensi tersebut, salah satunya adalah metode Alkire-Foster. Metode Alkire-Foster ini merupakan metode yang banyak diaplikasikan oleh para peneliti.

Metode Alkire-Foster dan Multidimensional Poverty Index (MPI)

Pada tahun 2007, Alkire dan Foster menciptakan suatu metode untuk mengukur kemiskinan multidimensi yang disebut Metode Alkire-Foster. Metode Alkire-Foster dibangun dengan mengacu pada kerangka kerja konseptual yang ditemukan oleh Sen (1976), yaitu identifikasi dan agregasi. Untuk tahapan agregasi, Alkire dan Foster (2011) mengadopsi ukuran Foster-Greer-Thorbecke (FGT) yang disesuaikan (adjusted FGT). Dua tahapan dasar dalam metode Alkire-Foster tersebut kemudian dijabarkan menjadi 12 langkah pengukuran kemiskinan multidimensi (Alkire dan Foster, 2009).



Sumber: Alkire dan Foster (2011)

Gambar 1. Langkah-Langkah Metode Alkire-Foster

Secara khusus, metode Alkire-Foster memperkenalkan pendekatan intuitif untuk mengidentifikasi penduduk miskin dengan menerapkan dual cutoff/ thresholds (garis kemiskinan ganda), yang dinotasikan dengan z dan k (Alkire dan Foster, 2011). Cutoff deprivasi z , merupakan garis kemiskinan pertama untuk masing-masing

indikator yang menunjukkan individu yang terdeprivasi pada indikator dalam suatu dimensi. Garis kemiskinan kedua adalah cutoff kemiskinan k , yaitu garis kemiskinan antardimensi yang menunjukkan seberapa besar deprivasi seseorang untuk dapat dikategorikan mengalami kemiskinan multidimensi.

Metode Alkire-Foster menghasilkan ukuran kemiskinan multidimensi yaitu: Multidimensional Poverty Headcount (H), average deprivation shared among poor (A), dan $M\alpha$. H merupakan insiden dari kemiskinan multidimensi, yang dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi. A menunjukkan intensitas kemiskinan, yaitu: rata-rata jumlah deprivasi yang dialami oleh orang miskin. $M\alpha$ merupakan ukuran agregat yang dihasilkan oleh metode Alkire-Foster. Jika $\alpha = 0$ maka diperoleh Adjusted Multidimensional Poverty Headcount Ratio (M0). M0 inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya MPI (Multidimensional Poverty Index) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi. M0 diperoleh dari hasil kali antara H dan A. Indeks inilah yang disepakati oleh UNDP dan OPHI sebagai indeks terbaru kemiskinan multidimensi.

Sejak tahun 2010, UNDP dan OPHI menyepakati sebuah indeks pengukuran kemiskinan baru yang dibangun oleh Alkire dan Santos (2010), yang disebut MPI (Multidimensional Poverty Index). Dalam penghitungannya, MPI menggunakan salah satu ukuran dalam metode Alkire-Foster yaitu M0. Menurut Alkire dan Santos (2014) terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan M0 sebagai komponen penyusun MPI, beberapa di antaranya adalah mempunyai ukuran yang kuat (robust), dapat diuraikan berdasarkan kelompok dalam populasi sehingga memungkinkan untuk melakukan perbandingan kemiskinan antarkelompok dalam suatu populasi, dan dapat dirinci berdasarkan dimensi atau indikator penyebab kemiskinan multidimensi.

Data yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan menggunakan MPI adalah data level rumah tangga. Dengan menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis, jika terdapat satu anggota rumah tangga mengalami deprivasi, akan berdampak pada seluruh anggota rumah tangga tersebut. Rumah tangga dikatakan

miskin secara multidimensi jika bobot indikator yang dialami sama dengan atau lebih dari sepertiga jumlah bobot dimensi atau $\geq 33,33$ persen. Alasan pemilihan titik potong kedua (second cutoff) sebesar 33,33 persen tersebut menurut Alkire dan Santos (2014) adalah karena memiliki dasar kebenaran yang normatif, memiliki keluasan distribusi terhadap hasil pengukuran kemiskinan, serta mampu menangkap kemiskinan akut. Kemiskinan akut ini dimaknai oleh Alkire dan Santos (2014) sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum internasional sesuai dengan indikator yang tertera dalam Millenium Development Goals (MDGs) dan menjalankan fungsi yang berarti dalam masyarakat.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Kemiskinan Multidimensi, dalam hal ini M0 menjadi variabel utama penelitian ini. Terdapat beberapa modifikasi untuk dimensi dan indikator dari metode Alkire-Foster yang dikembangkan oleh Alkire dan Santos (2010; 2014). Modifikasi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Dengan menerapkan metode Alkire-Foster yang dikembangkan oleh Alkire dan Santos (2010; 2014), penelitian ini menggunakan sistem pembobotan nested weight, unit analisis, pemilihan indikator, dimensi, titik potong/cutoff pertama, dan titik potong/cutoff kedua seperti yang dilakukan oleh UNDP dalam menghitung MPI. Sistem pembobotan nested weight dimaksud artinya setiap dimensi mempunyai bobot yang sama dan dalam dimensi yang sama, masing-masing indikator mempunyai bobot yang setara. Namun untuk dimensi yang berbeda, bobot antarindikator bisa berbeda (Alkire dan Santos, 2010).

Rumah tangga atau individu yang terdeprivasi pada titik potong/ cutoff pertama diberi skor 1, dan yang tidak terdeprivasi diberikan skor 0. Kemudian, dengan mengadopsi penelitian Alkire dan Robles (2015) digunakan cutoff kedua sebesar 1/3 atau sekitar 33,33 persen. Suatu rumah tangga atau individu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga atau individu yang mengalami kemiskinan

multidimensi jika total bobot per individu maupun rumah tangga lebih besar atau sama dengan 33,33 persen. Selanjutnya, meskipun variabel utama dalam penelitian

ini adalah kemiskinan multidimensi, namun kemiskinan moneter tetap disertakan, sebagai pembanding terhadap kemiskinan multidimensi.

Tabel 1. Dimensi, Indikator, Titik Potong Pertama (cutoff) Deprivasi dan Pembobot dalam Penghitungan Kemiskinan Multidimensi.

Dimensi	Indikator	Cutoff deprivasi/ rumah tangga terdeprivasi jika...	Bobot
Nutrisi dan Kesehatan	Konsumsi Kalori Rumah Tangga	Konsumsi kalori rumah tangga kurang dari 70 persen Angka Kecukupan Gizi (2013)	1/6
	Konsumsi Protein Rumah Tangga	Konsumsi protein rumah tangga per hari kurang dari 80 persen Angka Kecukupan Gizi (2013)	1/6
Pendidikan	Lama sekolah	Tidak ada anggota rumah tangga yang telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun (SMP atau sederajat)	1/6
	Partisipasi Sekolah	Terdapat anak usia sekolah (7—15 tahun) yang putus sekolah SMP atau sederajat.	1/6
Standar Hidup	Bahan bakar memasak	Bahan bakar yang digunakan kayu bakar atau arang	1/18
	Sanitasi	Tidak memiliki sanitasi <i>improved</i>	1/18
	Air bersih	Tidak mempunyai akses air minum <i>improved</i>	1/18
	Akses listrik	Tidak mempunyai akses listrik	1/18
	Jenis lantai terluas	Jenis lantai tanah, dari kotoran hewan, atau pasir	1/18
	Aset yang dimiliki	Tidak memiliki mobil atau perahu motor dan tidak memiliki lebih dari satu aset berikut, seperti: sepeda motor, sepeda, perahu, televisi kabel, AC, pemanas air (<i>water heater</i>), tabung gas 12 kg atau lebih, kulkas/lemari es, dan telepon.	1/18

Sumber: Alkire dan Santos (2010; 2014), dimodifikasi

Alat Analisis

Alat analisis utama yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama 2011—2013, persentase penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi (H) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang terus menurun. Tercatat sejak 2011—2013, H mengalami penurunan sebesar 5,72 persen, yaitu dari 43,74 persen menjadi 38,02 persen pada 2013. Penurunan H tersebut sejalan dengan turunnya intensitas kemiskinan multidimensi (A). Total penurunan A sejak 2011—2013 adalah 1,28 persen, yang artinya penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah terdeprivasi pada jenis indikator yang semakin sedikit. Tren penurunan H dan A tersebut berakibat pada

menurunnya tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh M0.

Berdasarkan klasifikasi daerah, terlihat dari Tabel 2 bahwa intensitas kemiskinan multidimensi (A) dan tingkat kemiskinan multidimensi (M0) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi daripada wilayah perkotaan, bahkan melebihi angka provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk di daerah perdesaan mengalami deprivasi dengan jenis indikator yang lebih banyak daripada penduduk di daerah perkotaan dengan tingkat kemiskinan multidimensi yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2011—2013 merupakan fenomena perdesaan. Temuan tersebut sejalan dengan kemiskinan moneter hasil perhitungan dari BPS, yang

juga merupakan fenomena perdesaan. Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Prabowo (2012), Yu (2013), serta Hanandito dan Tampubolon (2015), tentang

kemiskinan multidimensi sebagai fenomena perdesaan turut memperkuat argumen tersebut.

Tabel 2. Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Daerah, 2011—2013

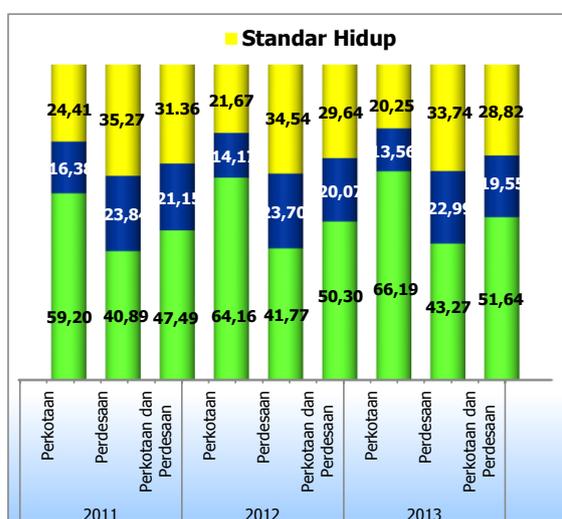
Provinsi dan Klasifikasi Daerah	2011			2012			2013		
	H (%)	A (%)	Mo (%)	H (%)	A (%)	Mo (%)	H (%)	A (%)	Mo (%)
Jawa Tengah	43,74	45,53	19,91	40,96	44,84	18,37	38,02	44,25	16,82
Perkotaan	36,4	43,11	15,69	36,18	42,24	15,28	32,18	41,64	13,4
Perdesaan	49,92	47,01	23,47	44,99	46,61	20,97	42,95	45,91	19,72

Sumber: Susenas 2011—2013, diolah

Dekomposisi M0 Berdasarkan Klasifikasi Daerah

Tingkat kemiskinan multidimensi yang telah disesuaikan (M0) selanjutnya dapat didekomposisi berdasarkan dimensi-dimensi dan indikator pembentuknya. Kontribusi untuk masing-masing dimensi terhadap M0 berdasarkan klasifikasi daerah tersaji dalam Gambar 2.

Dimensi Nutrisi dan Kesehatan



Sumber: Susenas 2011—2013, diolah

Gambar 2. Kontribusi Masing-masing Dimensi Terhadap M0 di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Daerah, 2011—2013 (Persen).

Gambar 2 memperlihatkan bahwa dimensi nutrisi dan kesehatan memberikan kontribusi terbesar terhadap M0. Selama kurun waktu 2011—2013, proporsi

kontribusi nutrisi dan kesehatan di perkotaan selalu lebih tinggi daripada proporsi di perdesaan. Tingginya proporsi dimensi nutrisi dan kesehatan di daerah perkotaan daripada perdesaan dapat disebabkan adanya pergeseran porsi belanja kebutuhan primer, misalnya makanan, yang beralih menjadi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Data BPS menyebutkan bahwa pada 2013, persentase pengeluaran penduduk perkotaan di Jawa Tengah untuk konsumsi makanan hanya sebesar 45,66 persen, lebih rendah dibandingkan perdesaan dengan persentase 54,61 persen (BPS, 2014: 64).

Kecenderungan peralihan pemenuhan kebutuhan tersier ataupun sekunder yang semakin tinggi daripada kebutuhan primer untuk daerah perkotaan bisa diartikan sebagai salah satu indikator bahwa tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan lebih baik jika dibandingkan penduduk perdesaan. Namun demikian, temuan ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar deprivasi yang dialami oleh penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan se-Provinsi Jawa Tengah adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumsi kalori dan protein. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian karena kekurangan konsumsi kalori dan protein yang terjadi secara terus menerus dapat berakibat serius terhadap kesehatan dan daya tahan tubuh seseorang. Bahkan, menurut Almatsier (2003 dalam Handono, 2010) kekurangan konsumsi

kalori dan protein pada anak-anak dapat menghambat pertumbuhan, rentan terhadap penyakit infeksi, dan mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan.

Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan dimensi dengan kontribusi terendah untuk M0, pada periode 2011—2013. Meskipun masing-masing klasifikasi daerah memiliki tren yang terus menurun, akan tetapi proporsi kontribusi dimensi pendidikan terhadap tingkat kemiskinan multidimensi (M0) di perdesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan. Untuk daerah perdesaan, indikator lama sekolah memiliki andil yang cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap M0 karena menempati posisi tertinggi kedua setelah indikator konsumsi protein rumah tangga. Walaupun menunjukkan tren penurunan, tingginya proporsi indikator ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk miskin multidimensi di Provinsi Jawa Tengah yang tidak atau belum menamatkan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya agar pendidikan lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di manapun mereka berada, karena selain sebagai komponen fundamental dari kualitas hidup seseorang, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam pembentukan modal manusia.

Dimensi Standar Hidup

Dimensi yang ketiga adalah standar hidup. Selama kurun waktu 2011—2013, kontribusi dimensi ini terhadap M0 menempati posisi kedua terbesar setelah dimensi nutrisi dan kesehatan. Proporsi kontribusi dimensi standar hidup yang jauh lebih tinggi perdesaan daripada perkotaan, mengindikasikan deprivasi yang dialami oleh penduduk daerah perdesaan dalam hal bahan bakar memasak, sanitasi improved, akses air minum improved, akses listrik, lantai rumah yang baik, serta aset adalah lebih banyak daripada penduduk daerah perkotaan. Temuan tersebut juga menunjukkan adanya disparitas dimensi standar hidup antara daerah perdesaan dan

perkotaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Battiston et al. (2013) tentang adanya disparitas yang cukup signifikan antara daerah perdesaan dan perkotaan dalam hal dimensi standar hidup dan pendidikan di empat negara, seperti: Brazil, Chili, Meksiko, dan El Savador.

Kemiskinan Multidimensi Berdasarkan Kabupaten/Kota

Pada dasarnya, kemiskinan multidimensi dihadirkan untuk dapat saling melengkapi dengan kemiskinan moneter, bukan untuk menandingi atau bahkan menggantikan analisis kemiskinan moneter (Prabowo, 2012). Mengingat dimensi moneter juga merupakan dimensi yang penting dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu perlu melihat kemiskinan tidak hanya dari sisi moneter saja melainkan juga dari sisi multidimensi.

Terkait hal tersebut, analisis untuk kemiskinan multidimensi dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada ukuran-ukuran seperti: H (persentase penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi), A (intensitas dari kemiskinan multidimensi/ rata-rata nilai deprivasi yang dialami oleh penduduk miskin multidimensi), dan M0 (tingkat kemiskinan multidimensi yang sudah disesuaikan dengan intensitasnya). Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa M0 merupakan ukuran agregasi, yang dihitung dengan formula FGT.

Menurut Alkire dan Foster (2011), salah satu keuntungan ukuran-ukuran kemiskinan multidimensi (H, A, dan M0) adalah dapat diuraikan berdasarkan kelompok. Hal ini memungkinkan untuk melakukan perbandingan kemiskinan antarkelompok dalam suatu populasi. Dengan alasan tersebut, akan disajikan ukuran kemiskinan multidimensi pada tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah, yang hasil penghitungannya ditampilkan di Gambar 3. Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa selama kurun waktu 2011—2013, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, dan Kota Tegal merupakan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan multidimensi terkecil di Jawa

Tengah, sedangkan Kabupaten Banjarnegara selalu menempati posisi

tertinggi. Temuan ini sejalan dengan temuan Hanandita dan Tampubolon (2015).



Sumber: Susenas 2011—2013, diolah

Gambar 3. Ukuran Kemiskinan Multidimensi per Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, 2011—2013.

Dalam penelitiannya, Hanandita dan Tampubolon (2015) menyebutkan bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu dari 5 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin dan tingkat kemiskinan multidimensi tertinggi di

Indonesia. Penelitian mereka menggunakan beberapa indikator berbeda seperti, pengeluaran konsumsi per kapita per hari, jumlah penyakit yang diderita, lama sakit yang diderita, dan melek huruf. Namun demikian, meskipun indikatornya berbeda,

temuan ini semakin menegaskan Kabupaten Banjarnegara sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan multidimensi yang tinggi. Berdasarkan hal itu, tentunya perlu upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat bersama dengan pihak swasta maupun lembaga terkait agar lebih fokus dalam menangani kemiskinan, terutama pada beberapa dimensi yang dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan multidimensi pada wilayah tersebut.

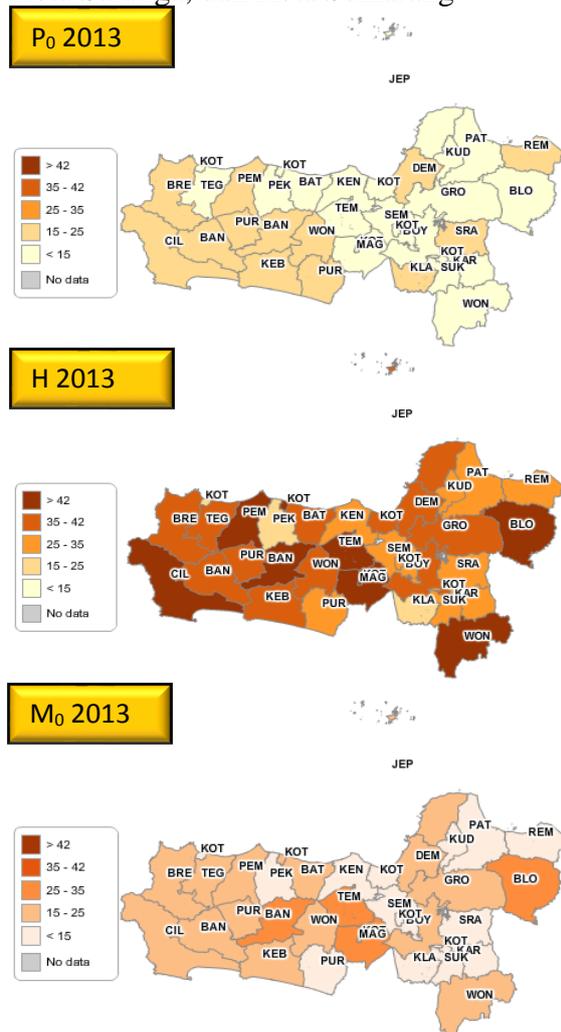
Pemetaan Kemiskinan Multidimensi dan Moneter di Provinsi Jawa Tengah

Pemetaan kemiskinan multidimensi dan moneter diperlukan untuk memperoleh gambaran secara spasial mengenai sebaran insiden dari kedua pengukuran kemiskinan tersebut, serta tingkat kemiskinan multidimensi yang terjadi pada kurun waktu 2011—2013. Mengacu pada konsep BPS (2004 dalam Ahmad dan Goh, 2007:180; Prabowo, 2012) tentang klasifikasi dalam memetakan penduduk miskin di Indonesia, maka persentase penduduk miskin tiap kabupaten/kota dikategorikan menjadi 4 tingkatan, yaitu: rendah (< 15,00 persen), sedang (15,00—24,99 persen), tinggi (25—34,99 persen), dan sangat tinggi ($\geq 35,00$ persen). Namun untuk melihat lebih spesifik pada kategori sangat tinggi, maka kategori sangat tinggi dibedakan lagi menjadi 2, yaitu: 35,00—41,99 persen dan $\geq 42,00$ persen. Terkait penelitian ini, dengan menggunakan aplikasi program Statplanet, tingkat rendah tertulis: <15, tingkat sedang tertulis: 15—25, tingkat tinggi: 25—35, tingkat sangat tinggi: 35—42 dan >42.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua ukuran kemiskinan, yaitu M0 dan P0, sama-sama merupakan ukuran agregasi, yang dihitung dengan formula FGT. Selama 2011—2013, kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan hanya mempertimbangkan dimensi moneter ternyata memberikan gambaran yang berbeda dengan kemiskinan yang diukur dengan mempertimbangkan berbagai dimensi (multidimensi).

Pada pembahasan ini disajikan gambaran mengenai kondisi H, M0, dan P0

pada 2013. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada dua tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 4, diperoleh gambaran yang berbeda antara persentase penduduk yang mengalami kemiskinan secara moneter dan multidimensi. Gambar-gambar tersebut juga memberikan perbedaan yang cukup mencolok. Selama 2011—2013, daerah pantura (pantai utara) Jawa Tengah yang menunjukkan penurunan persentase kemiskinan multidimensi secara konsisten dari waktu ke waktu dan termasuk dalam kategori rendah adalah Kabupaten Pekalongan. Secara keseluruhan terdapat enam kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selama 2011-2013 tingkat kemiskinan multidimensinya stabil berada kategori rendah, yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.



Sumber: Susenas 2013, diolah
 Gambar 4. Peta Sebaran P0, H, dan M0 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2013.

Sementara itu, beberapa wilayah yang perlu mendapatkan penanganan lebih serius dalam hal tingkat kemiskinan multidimensi, adalah: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Magelang. Keempat kabupaten tersebut, selama 3 tahun berturut-turut terus menunjukkan tingkat kemiskinan multidimensi tinggi, dengan persentase penduduk miskin multidimensi yang sangat tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis kemiskinan multidimensi di Provinsi Jawa Tengah, selama 2011—2013, adalah bahwa secara deskriptif, persentase penduduk miskin multidimensi (H), intensitas kemiskinan multidimensi (A), dan tingkat kemiskinan multidimensi (M0) di tingkat Provinsi menunjukkan tren yang terus menurun. Hasil berbeda akan terlihat ketika mengamati ukuran-ukuran kemiskinan hingga tingkat kabupaten/kota yang cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Kemiskinan yang diukur dengan hanya mempertimbangkan dimensi moneter ternyata memberikan gambaran yang berbeda dengan kemiskinan yang diukur dengan mempertimbangkan berbagai dimensi (multidimensi).

Persentase penduduk miskin multidimensi yang lebih besar dibanding persentase penduduk miskin secara moneter, mengindikasikan bahwa terdapat penduduk yang tidak teridentifikasi miskin secara moneter namun masih mengalami deprivasi pada berbagai dimensi kemiskinan yang lain. Seperti halnya kemiskinan moneter, kemiskinan multidimensi juga menunjukkan fenomena perdesaan, yang berarti: selain rata-rata persentase penduduk miskin multidimensi di daerah perdesaan lebih tinggi, rata-rata penduduk miskin di perdesaan juga terdeprivasi pada jenis indikator yang lebih banyak daripada di daerah perkotaan.

Kontributor terbesar terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Jawa Tengah (M0) adalah dimensi nutrisi dan kesehatan, terutama berasal dari indikator konsumsi protein rumah tangga, yang

diikuti dengan dimensi standar hidup dan pendidikan. Dengan mendekomposisi hingga tingkat kabupaten/kota, diperoleh bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, selama 3 tahun berturut-turut.

Implikasi Kebijakan

Perlunya mengevaluasi kembali pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti program Raskin, Desa Mandiri Pangan, Desa Mandiri Energi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta program-program lain yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, program-program tersebut merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan pemenuhan hak dasar anak dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup.

Keterbatasan

Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terhadap indikator pembentuk kemiskinan multidimensi di Provinsi Jawa Tengah, karena keterbatasan data, mengakibatkan ukuran-ukuran kemiskinan multidimensi yang dihasilkan tidak dapat diperbandingkan secara internasional. Namun demikian, ukuran-ukuran kemiskinan multidimensi yang dihasilkan tersebut masih dapat diperbandingkan secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., dan Foster, J. (2009). Counting and Multidimensional Poverty. In J.v. Braun, R.V. Hill, dan R. Pandya-Lorch (Eds.). *The Poorest and Hungry: Assesments, Analyses, and Actions* (pp.77-89). Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.
- Alkire, S., dan Foster, J. (2011). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Journal of Public Economics*, 95, 476—487.

- Alkire, S., dan Robles, G. (2015). Multidimensional Poverty Index-2015: Brief Methodological Note and Results. The Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).
- Alkire, S., dan Santos, M. E. (2010). Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries. In *Human Development Research Paper 2010/2011*. UNDP.
- Alkire, S., dan Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251—274.
- Ahmad, Y., dan Goh, C.-C. (2007). *Indonesia's poverty maps: Impacts and lessons*. In T. Bedi, A. Coudouel, dan K. Simler (Eds.), *More than a Pretty Picture: Using Poverty Maps to Design Better Policies and Interventions* (pp. 177—187). Washington D.C.: The World Bank.
- Anand, S., dan Sen, A. K. (1997). Concept or Human Development and Poverty! A Multidimensional Perspective. *United Nations Development Programme: Human Development Papers*, 1—20
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan (5ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2013*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2009—2013*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Ballon, P., dan Apablaza, M. (2012). Multidimensional Poverty Dynamics in Indonesia. Research in Progress. Oxford Poverty and Human Development Initiative.
- Bank Dunia. (2001). *World Development Report 2000/2001*. Washington, D.C.: Bank Dunia.
- Bank Dunia. (2015). Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Diakses pada 20 Juni 2015, dari <http://www.worldbank.org/in/country/in-donesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia>
- Battiston, D., Cruces, G., Lopez-Calva, L. F., Lugo, M. A., dan Santos, M. E. (2013). Income and Beyond: Multidimensional Poverty in Six Latin America Countries. *Social Indicator Research*, 112, 291—314.
- Bourguignon, F., dan Chakravarty, S. R. (2003). The Measurement of Multidimensional Poverty. *Journal of Economic Inequality*, 1, 25—49.
- Ferreira, F., dan Lugo, M. A. (2013). Multidimensional Poverty Analysis: Looking For a Middle Ground. *World Bank Res. Obs.*, 28, 220—235.
- Hanandita, W., dan Tampubolon, G. (2015). Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003-2013). *Social Indicators Research*, 015—1044, 10.1007—11.205.
- Handono, N. P. (2010). Hubungan Tingkat Pengetahuan Pada Nutrisi, Pola Makan, dan Energi Tingkat Konsumsi dengan Status Gizi Anak Usia Lima Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Selogiri, Wonogiri. *Jurnal Keperawatan*, Vol.1 No.1, 1—7.
- Isard, Walter and Barton, Bruce (1983). Importance of Regional Analysis for National Economic Growth Policies. Monograph 83-01.
- Muro, P. D., Mazziota, M., dan Pareto, A. (2011). Composite Indices of Development and Poverty: An Application to MDGs. *Social Indicators Research*, 104, 1—18.
- Prabowo, B. (2012). Analisis dan Pemetaan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, 2008 dan 2011 (Pendekatan Multidimensional dan Moneter). Tesis tidak dipublikasikan. MEP FEB UGM, Yogyakarta.
- Sen, A. K. (1976). Poverty: an Ordinal Approach to Measurement. *Econometrica*, 44 No.2.
- Wardhana, D. (2010). Multidimensional Poverty Dynamics in Indonesia (1993—2007). Tesis. Tidak Dipublikasikan. University of Nottingham
- Yu, J. (2013). Multidimensional Poverty in China: Findings Based on the CHNS. *Social Indicators Research*, 112, 315—336.